

## ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu faktor ekonomi penting dan strategis di masa mendatang. Perencanaan dan pengembangan industri pariwisata memerlukan strategi yang terperinci dan matang. Selain itu, pariwisata diharapkan mampu menunjang upaya – upaya pelestarian alam, kekayaan hayati dan kekayaan budaya. Dalam meningkatkan potensi-potensi wisata yang ada, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pungutan yang berupa retribusi, dalam hal ini adalah retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang tergolong dalam retribusi jasa usaha. Retribusi tempat rekreasi atau wisata diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Perda Retribusi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes sebagai salah satu sumber PAD serta apa sajakah hambatan dan solusi yang dilakukan atas implementasi perda tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Brebes, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai leading sector dalam pembangunan pariwisata perlu kiranya meningkatkan kualitas dan kelengkapan, serta sarana dan prasarana pada obyek-obyek wisata yang ada. Tidak terbatas hanya pada fasilitas saja, namun kualitas pelayanan dari sumber daya manusia di lapangan dan peningkatan promosi melalui berbagai media baik online maupun secara langsung. Kurangnya sosialisasi tentang Perda Retribusi ini kepada masyarakat dan petugas di lapangan, sehingga implementasi perda tersebut menjadi kurang maksimal. Selain itu belum maksimalnya sinergitas antara pemangku kepentingan dan stakeholders dalam pembangunan sector pariwisata di Kabupaten Brebes. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi perda ini antara lain yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat sekitar akan kesadaran dalam pengembangan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata yang menyebabkan kurangnya minat wisatawan untuk datang berkunjung ke suatu daerah wisata. Selain itu kurangnya kelengkapan fasilitas, sarana prasarana pada suatu obyek wisata juga sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata yang sekaligus akan mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata khususnya. Dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jika dapat dilakukan evaluasi dan peningkatan pembangunan pada suatu obyek dan daya tarik wisata yang ada pada suatu daerah, maka peningkatan realisasi penerimaan retribusi khususnya pada sektor pariwisata akan meningkat setiap tahunnya.

Kata kunci : Retribusi, Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah.

## **ABSTRACT**

Tourism is one of the important and strategic economic factors in the future. Planning and development of the tourism industry requires detailed and mature strategies. In addition, tourism is expected to be able to support efforts - conservation of nature, biological wealth and cultural wealth. In enhancing existing tourism potentials, local governments are permitted to levy in the form of levies, in this case are levies for recreation and sports which are classified as business service fees. Recreation or tourism levies are expected to be able to provide a large contribution in increasing Regional Original Income (PAD).

The formulation of the problem in this research is how is the implementation of the Regional Regulation on Retribution in the Culture and Tourism Brebes District Office as one of the sources of PAD and what are the obstacles and solutions made to the implementation of the regulation. The approach method used in this study is a sociological juridical approach, namely identifying and conceptualizing law as real and functional social institutions in real life systems. Based on the results of the study it can be concluded that the Brebes Regency government, especially the Culture and Tourism Office as the leading sector in tourism development needs to improve the quality and completeness, as well as facilities and infrastructure in the existing tourist objects. Not only limited to facilities, but the quality of service from human resources in the field and increased promotion through various media both online and directly. The lack of socialization about the Regional Regulation on Retribution is to the community and officers in the field, so that the implementation of the regulation becomes less than optimal. In addition, the synergy between stakeholders and stakeholders has not been maximized in the development of the tourism sector in Brebes Regency. While the obstacles faced in implementing this regulation include the low level of community participation in awareness in the development and management of tourist objects and attractions which causes a lack of interest of tourists to come to visit a tourist area. In addition to the lack of complete facilities, infrastructure in a tourist attraction also greatly influences tourist visits to a tourist destination which will also affect the amount of local revenue from the tourism sector in particular. From the foregoing, it can be concluded that if an evaluation and improvement can be made on an existing tourist object and attraction in an area, then the increase in the realization of receipts of levies, especially in the tourism sector, will increase every year.

**Keywords:** Retribution, Tourism, Local Revenue.